



#BKNBapaknyaParaASN

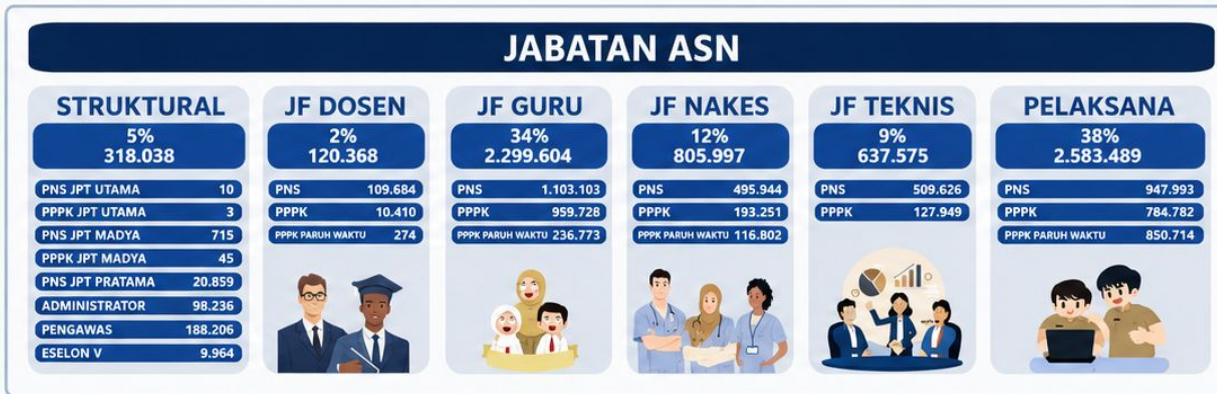
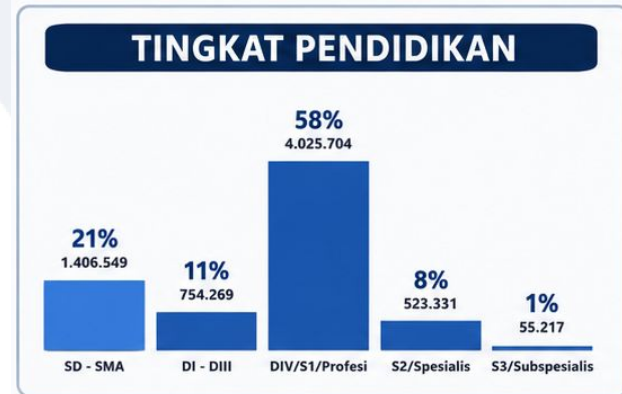
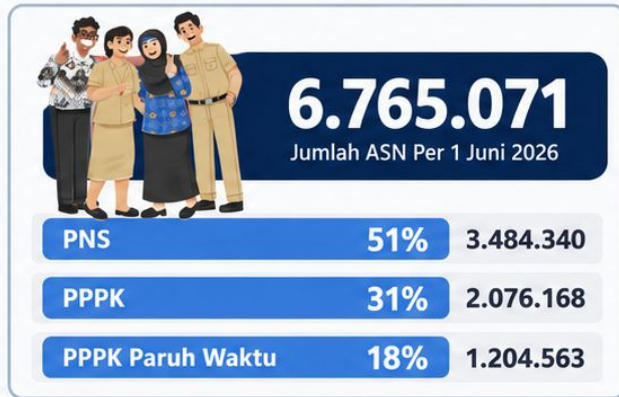
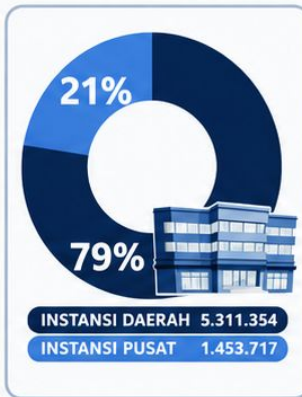
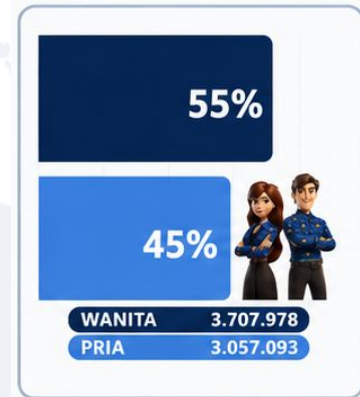
RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA KOMISI II DPR RI

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2027 dan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027

JAKARTA, JUNI 2026

OUTLINE

- 1 Data Statistik ASN
- 2 Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran BKN Tahun 2026
- 3 Rencana Kerja BKN Tahun 2027
- 4 SBPI BKN Tahun 2027 dan Usulan Kebutuhan Tambahan
Anggaran BKN Tahun 2027



Sumber : SIASN BKN

-YN-

Data Diolah oleh Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN



#BKNBapaknyaParaASN

ASN DIGITAL

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2026



@BKNgoid



@BKNgoidofficial



www.bkn.go.id



Layanan Seleksi

Seleksi ASN merupakan layanan yang **digunakan dalam rangka Pengadaan ASN** sebagai gerbang awal pendaftaran calon ASN. Data Formasi terintegrasi dengan Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN untuk menjamin data penetapan formasi konsisten dengan data formasi di Layanan Seleksi sampai penetapan usulan NIP/NIPPPK.

01



BADAN GIZI NASIONAL

Pemenuhan ASN BGN

(Perpres Peraturan Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional)

- Verifikasi dan validasi formasi ASN BGN;
- Penetapan NIP ASN BGN sebanyak 2.065 pertek pada tahun 2025 dan 32.597 pertek pada Tahun 2026
- Penetapan penugasan BGN sebanyak:
 - Tahun 2024: 2 pertek/SK
 - Tahun 2025: 60 pertek/SK
 - Tahun 2026: 8 pertek/SK
- Penetapan pindah instansi sebanyak 16 SK pada tahun 2025 dan 34 SK pada tahun 2026

02



Sekolah Rakyat

(Inpres 7 tahun 2025)

- Verifikasi dan validasi formasi ASN Sekolah Rakyat
- Penetapan NIP ASN Sekolah Rakyat sebanyak:
 - Tahun 2025: 2.215 pertek
 - Tahun 2026: 2.376 pertek
- Penetapan penugasan ASN Sekolah Rakyat pada tahun 2025 sebanyak 97 pertek/SK

03



Sekolah Unggul Garuda

(Inpres 7 tahun 2025)

- Verifikasi dan validasi formasi ASN Sekolah Garuda
- Pemenuhan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sebanyak 12 orang pada Tahun 2026;
- Pemenuhan guru SMA Sekolah Unggul Garuda sebanyak 76 orang.

04



Seleksi KDKMP dan KNMP

(Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2026)

- PHTC Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih
- Seleksi Program Hasil Terbaik Cepat KDKMP/KNMP BP BUMN*
- **380.852** peserta

 Catatan: Seleksi KDKMP dan KNMP (non ASN/Pegawai BUMN)



Capaian Penerapan Manajemen Talenta ASN

ASN DIGITAL

Ringkasan status instansi dan hasil rekomendasi talenta

Status instansi dalam pembangunan & penerapan

Persentase kecil dihitung dari total 643 instansi

1 643 INSTANSI
100%
TOTAL INSTANSI DALAM
PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN
MANAJEMEN TALENTA

2 588 INSTANSI
91,4%
KOMITMEN PEMBANGUNAN
MANAJEMEN TALENTA

3 202 INSTANSI
31,4%
SK PERSETUJUAN PENERAPAN
MANAJEMEN TALENTA

4 206 INSTANSI
32,0%
EKSPOSE MANAJEMEN TALENTA

5 99 INSTANSI
15,4%
PENGISIAN JABATAN MELALUI
MANAJEMEN TALENTA

Hasil rekomendasi talenta untuk pengisian jabatan

3.955

TALENTA

TALENTA YANG DIUSULKAN
DALAM PENGISIAN JABATAN

99,4%

talenta direkomendasikan

0,6% tidak direkomendasikan

3.931 TALENTA
DIREKOMENDASIKAN

24 TALENTA
TIDAK DIREKOMENDASIKAN

DATA PER 29 MEI 2026

Pengelolaan Kinerja Pegawai dengan Pengisian Kinerja Harian



Data per 29 Mei 2026



JUMLAH ASN

6.765.071



Target 50% ASN yang Menerapkan Kinerja Harian
(3.392.353)



PROGRESS



97 Instansi Pemerintah
Menerapkan Fitur Kinerja Harian pada Layanan e-Kinerja



1.054.419 (15,54%) ASN Menggunakan Kinerja Harian



9 Instansi Pusat



88 Instansi Daerah



2026

Timeline

2027

- Target Instansi yang dilakukan Pembinaan sebanyak **322 Instansi** tahun 2026

- Target Instansi yang dilakukan Pembinaan sebanyak **321 Instansi** tahun 2027



Meningkatnya nilai sistem merit Instansi Pemerintah



Menurunnya tingkat pelanggaran manajemen ASN



Penyelesaian Permasalahan Manajemen ASN minimal 5 hari kerja

8 ASPEK PEMBINAAN MANAJEMEN ASN



Perencanaan Kebutuhan ASN & Standardisasi Jabatan



Implementasi Manajemen Talenta



Pengelolaan Kinerja ASN



Pengembangan Kompetensi ASN



Budaya Kerja dan Citra Institusi



Penghargaan dan Pengakuan

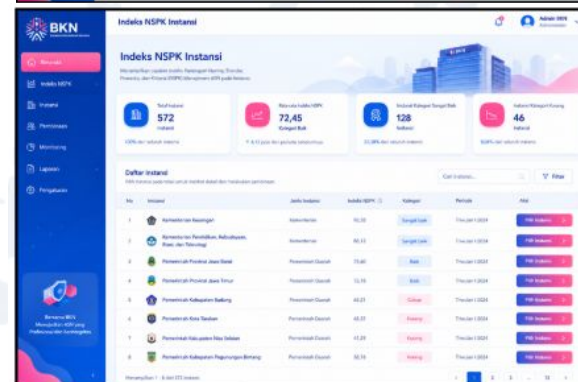
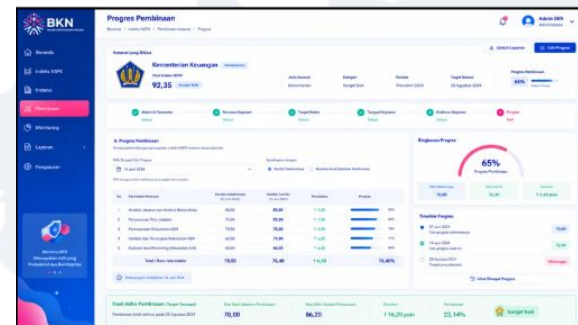


Disiplin, Pemberhentian dan Upaya Administratif



Digitalisasi Manajemen ASN

Saat ini telah *dilaunching* Sistem Monitoring Pembinaan Manajemen Asn Terintegrasi Tahun 2026 - 2027



Peta Kebutuhan dan Karier Jabatan Fungsional Manajemen ASN

REKOMENDASI KEBUTUHAN JF MASN KESELURUHAN (by Instansi/Jabatan)

	Analisis SDM Aparatur	Asesor SDM Aparatur	Auditor Manaje men	Pranata SDM Aparatur	Distribu si Instansi
Total Instansi yang sudah diberi rekomendasi JFMASN:	631	249	1	289	634
Persentase	96.48%	38.07%	100.00%	44.19%	98.60%

REKOMENDASI KEBUTUHAN JF MASN 2026

Bulan	Analisis SDM Aparatur	Asesor SDM Aparatur	Pranata SDM Aparatur	Grand Total
Januari	7	2	4	13
Februari	4	3	2	9
Maret	5	2	4	11
April	3	2	1	6
Mei	1	1	1	3
Total	20	10	12	42



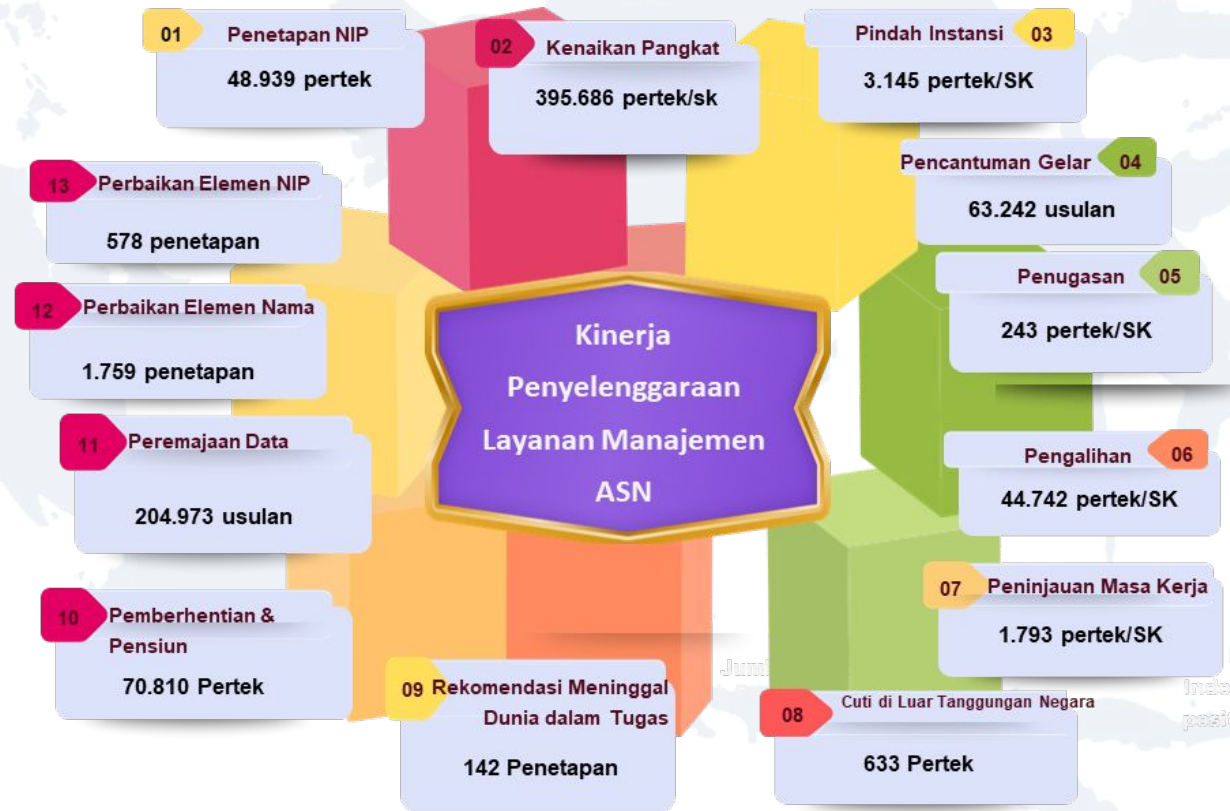
Telah diberikan rekomendasi kebutuhan JF MASN pada 634 instansi pemerintah dari total keseluruhan instansi:

- 631 rekomendasi kebutuhan pada formasi Jabatan Analis SDM Aparatur;
- 249 rekomendasi kebutuhan pada formasi Jabatan Asesor SDM Aparatur;
- 1 rekomendasi kebutuhan pada formasi Jabatan Auditor Manajemen ASN; dan
- 289 rekomendasi kebutuhan pada formasi Jabatan Pranata SDM Aparatur

Kinerja Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN

Data per 31 Mei 2026

Realisasi kinerja penyelenggaraan layanan manajemen ASN yang merupakan kewenangan pusat dan kantor regional di tahun 2026



Capaian Perencanaan Kebutuhan ASN	
Pelayanan perencanaan kebutuhan ASN sesuai standar	4.471 usulan (90,58%)
Pengisian informasi jabatan	73,75%
Progres Penyusunan Pertimbangan Teknis Nasional Tahun 2027	60% meliputi: Perhitungan kebutuhan ASN berbasis potensi wilayah; Breakdown angka kebutuhan ASN untuk mendukung potensi wilayah; dan Perhitungan kebutuhan ASN dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi wilayah

Pengawasan Penerapan Sistem Merit



BKN berkomitmen untuk melakukan perlindungan dan pengembangan karier ASN melalui Integrated Mutasi (I-Mut) yang sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Pada tahun 2026 terdapat **7.619 ASN Non JPT** dan **193 JPT** yang telah dilindungi kariernya.

6.881 Rekomendasi

64.338 ASN

Kategori	Dapat Dipertimbangkan/Direkomendasikan	Dapat Dipertimbangkan/Direkomendasikan dengan Catatan	Tidak Dapat Dipertimbangkan/Direkomendasikan	Tidak Dapat Diproses	Total ASN
Pengangkatan dan Promosi	17.279	3.330	430	1.987	23.026
Mutasi dan Pengukuhan	26.686	4.891	1.425	3.458	36.460
Pemberhentian dan Hukdis *)	4.387	1.46	159	160	4.852
Total	48.352 (75,16%)	8.367 (13,00%)	2.014 (3,13%)	5.605 (8,71%)	64.338

*) Pemberhentian dari ASN dan dari Jabatan

Total ASN yang tidak sesuai NSPK dan prinsip meritokrasi adalah **7.619 ASN (11,84%)** dari total pengajuan 64.338 ASN

Sumber Data Integrated Mutasi.

Rekomendasi telah Terbit selama Periode 1 Januari s.d. 1 Juni 2026

ALASAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN/DIREKOMENDASIKAN

Pengangkatan dan Promosi

- o Usia melebihi ketentuan
- o Pendidikan di bawah persyaratan
- o Pengalaman jabatan belum memenuhi (misal belum memiliki pengalaman jabatan 3 tahun eselon IV untuk diangkat menjadi eselon III)
- o Predikat kinerja 2 tahun terakhir di bawah Baik
- o Masih dalam masa menjalani hukdis

Mutasi dan Pengukuhan

- o Masa kerja dalam jabatan di bawah ketentuan (belum 2 tahun dan tidak melampirkan SKP Periodik)
- o Untuk jabatan terkait pelayanan dasar, proses mutasinya membuat jabatan tersebut kosong (tidak ada pemangku jabatan tsb) di unit lama
- o Mutasi dari (misal) eselon III.a ke III.b tetapi BATPK/Baperjakat nya sangat baik

Pemberhentian dan Hukuman Disiplin

- o Prosedur dan substansi disiplin tidak terpenuhi:
 1. Unsur tim pemeriksa tidak terpenuhi
 2. Dugaan pelanggaran tidak terkonfirmasi pada BAP & LHP
 3. Dukungan bukti pelanggaran tidak dapat terkonfirmasi
 4. Salah pengenaan norma
- o Prosedur dan substansi evaluasi kinerja/tidak terpenuhinya target kinerja:
 1. Nilai kinerja tahunan bernilai baik/sangat baik
 2. Tidak dilakukan bimbingan/konseling kinerja secara berkala

1.163 Persetujuan dan Rekomendasi

9.149 Jabatan dan Pejabat

PERSETUJUAN RENCANA JPT

KATEGORI PERSETUJUAN RENCANA	SELEKSI TERBUKA (Jabatan)	UJI KOMPETENSI (Pejabat)	EVALUASI KINERJA (Pejabat)	TOTAL
Disetujui	1.052	1.568	124	2.744
Tidak Disetujui	11	25	0	36
Tidak Dapat Diproses	3	33	0	36
TOTAL	1.066	1.626	124	2.816

REKOMENDASI HASIL JPT

KATEGORI REKOMENDASI HASIL	SELEKSI TERBUKA (Pejabat)	UJI KOMPETENSI (Pejabat)	EVALUASI KINERJA (Pejabat)	TOTAL
Dapat Dipertimbangkan / Dapat Direkomendasikan/ Sesuai NSPK/ Dengan Catatan	3.407	2.515	290	6.212
Tidak Dapat Dipertimbangkan / Tidak Direkomendasikan/ Tidak Sesuai NSPK	46	62	11	119
Tidak Dapat Diproses	2	0	0	2
TOTAL	3.455	2.577	301	6.333

Total pengangkatan dan mutasi JPT yang berpotensi melanggar NSPK dan melanggar prinsip meritokrasi adalah **193 (2,11%)** dari total pengajuan **9.149**

ALASAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN/DIREKOMENDASIKAN

Evaluasi Kinerja

- Berstatus Penugasan (contoh: jaksa);
- Pemberhentian menjadi pejabat pelaksana dari JPT;
- Tidak sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Seleksi Terbuka

- Usia lebih dari 56 (lima puluh enam tahun);
- Tidak mengikuti salah satu tahapan pelaksanaan seleksi.

Uji Kompetensi/Jobfit

- Mutasi di bawah dua tahun namun memiliki nilai kinerja siklus pendek (periodik) dengan predikat "Baik" atau tidak menyampaikan evaluasi kinerja siklus pendek;
- Akan memasuki Batas Usia Pensiun dan sudah terbit SK pensiun;
- Jabatan masih diduduki oleh Pejabat lain;
- Tidak terdapat dalam Persetujuan Rencana Pelaksanaan Uji Kompetensi PPTP;
- Tidak sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Demosi/Pemberhentian hasil uji kompetensi.

Keterangan:

Total Rekomendasi Hasil JPT berdasarkan usulan yang terbit pada Tahun 2026.

Persetujuan Rencana JPT untuk Rekomendasi hasil JPT tersebut diterbitkan pada Tahun 2026 atau Tahun Sebelumnya

Sumber Data Integrated Mutasi. Persetujuan dan Rekomendasi telah Terbit selama Periode 1 Januari s.d. 1 Juni 2026

Pemblokiran adalah tindakan administratif berupa pembatasan sementara akses terhadap layanan kepegawaian, baik kepada individu ASN (**Pemblokiran Data ASN**) maupun kepada instansi (**Pemblokiran Layanan Instansi**), sebagai bentuk pengendalian untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Daftar Pemblokiran Layanan Kepegawaian pada Instansi

2025

1 (satu) Pemerintah Provinsi

1. Prov. Papua Pegunungan (**Buka Blokir Tahun 2026**)

4 (empat) Pemerintah Kabupaten

1. Kab. Malaka (**Buka Blokir Tahun 2025**)
2. Kab. Pati (**Buka Blokir Tahun 2025**)
3. Kab. Kepulauan Sula (**Buka Blokir Tahun 2025**)
4. Kab. Mappi (**Buka Blokir Sebagian Layanan**)

2026

1 (satu) Pemerintah Provinsi

1. Prov. Sulawesi Barat

1 (satu) Pemerintah Kabupaten

2. Kab. Kolaka Utara

Daftar ASN pada Instansi yang dilakukan Pemblokiran ASN

2025

Pengangkatan/pemberhentian/mutasi kepegawaian
Tidak Sesuai NSPK

1. Pemerintah Kab. Buton Selatan (94 ASN)
2. Pemerintah Kab. Donggala (22 ASN)

Tipikor/Tindak Lanjut Proses Pidana/Pemberhentian Lainnya

1. Pemerintah Kab. Lampung Utara (1 ASN)
2. Pemerintah Kab. Maluku Tengah (4 ASN)
3. Pemerintah Kab. Mamuju (1 ASN)
4. Pemerintah Kab. Sorong (2 ASN)
5. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (1 ASN)

Daftar ASN pada Instansi yang sudah Dibuka Blokir ASN

2025

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (1 ASN)
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (1 ASN)
3. Pemkab Aceh Barat (1 ASN)
4. Pemkab Bandung Barat (1 ASN)
5. Pemkab Barito Selatan (1 ASN)
6. Pemkab Bengkulu Tengah (3 ASN)
7. Pemkab Buleleng (1 ASN)
8. Pemkab Buton Selatan (84 ASN)
9. Pemkab Ciamis (1 ASN)
10. Pemkab Jepara (4 ASN)
11. Pemkab Kaimana (28 ASN)
12. Pemkab Karangasem (3 ASN)
13. Pemkab Karawang (9 ASN)
14. Pemkab Klungkung (3 ASN)
15. Pemkab Kuningan (2 ASN)
16. Pemkab Labuhanbatu Utara (9 ASN)
17. Pemkab Lombok Tengah (10 ASN)
18. Pemkab Lombok Utara (6 ASN)
19. Pemkab Mandailing Natal (8 ASN)
20. Pemkab Merangin (1 ASN)
21. Pemkab Minahasa Utara (1 ASN)
22. Pemkab Nagekeo (9 ASN)
23. Pemkab Pandeglang (6 ASN)
24. Pemkab Rejang Lebong (30 ASN)
25. Pemkab Seluma (8 ASN)
26. Pemkab Tangerang (9 ASN)
27. Pemkab Tapanuli Tengah (1 ASN)
28. Pemkab Timor Tengah Utara (10 ASN)
29. Pemkab. Pulang Pisau (1 ASN)
30. Pemkab. Sabu Raijua (1 ASN)
31. Pemkot Bandung (9 ASN)
32. Pemkot Bekasi (7 ASN)
33. Pemkot Binjai (4 ASN)
34. Pemkot Cilegon (4 ASN)
35. Pemkot Cirebon (2 ASN)
36. Pemkot Kupang (2 ASN)
37. Pemkot Pematangsiantar (5 ASN)
38. Pemkot Serang (1 ASN)
39. Pemkot Sibolga (5 ASN)
40. Pemkot Tangerang (1 ASN)
41. Pemkot Tebing Tinggi (14 ASN)
42. Pemkot Tegai (1 ASN)
43. Pemprov Bengkulu (7 ASN)
44. Pemprov Lampung (6 ASN)
45. Pemprov Nusa Tenggara Barat (1 ASN)
46. Pemprov Papua Barat Daya (1 ASN)

2026

1. Aceh Selatan (1 ASN)
2. Pemkab Badung (1 ASN)
3. Pemkab Bangli (2 ASN)
4. Pemkab Karo (4 ASN)
5. Pemkab Kepulauan Anambas (7 ASN)
6. Pemkab Labuhanbatu (1 ASN)
7. Pemkab Langkat (5 ASN)
8. Pemkab Majalengka (2 ASN)
9. Pemkab Nias Utara (2 ASN)
10. Pemkab Simalungun (2 ASN)
11. Pemkab Sumbawa Barat (7 ASN)
12. Pemkab Tanjung Jabung Barat (1 ASN)
13. Pemkot Depok (2 ASN)
14. Pemkot Gunung Sitoli (3 ASN)
15. Pemkot Pangkalpinang (1 ASN)
16. Pemkot Tanjungbalai (1 ASN)
17. Pemprov Bengkulu (18 ASN)
18. Pemprov Papua Barat Daya (1 ASN)
19. Pemprov Sulawesi Tenggara (1 ASN)
20. Pemprov Sumatera Utara (8 ASN)

ASN Digital (<https://asndigital.bkn.go.id/>) adalah super platform digital manajemen ASN terpadu dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengintegrasikan berbagai sistem manajemen kepegawaian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).



Jumlah Kunjungan ASN Digital

Total : **1,498,195,964** kunjungan per 1 Juni Tahun 2026
Rata-Rata Harian : **6,718,368** kunjungan per 1 Juni Tahun 2026

Jumlah Aktivasi MFA sebanyak 6,379,268 ASN (94.30%)
dari Total ASN per 1 Juni 2026 sebanyak 6,765,071 ASN



Dukungan Digitalisasi Manajemen ASN untuk Program Kegiatan Seleksi



Dukungan Digitalisasi Manajemen ASN untuk Sistem Merit



Dukungan Optimalisasi dan Peremajaan Infrastruktur TIK dan Keamanan Informasi



1. Dukungan Digitalisasi Manajemen ASN untuk Program Kegiatan Seleksi

01

Layanan Seleksi ASN

Digunakan dalam rangka Pengadaan ASN sebagai gerbang awal pendaftaran calon ASN.



Rata rata harian penggunaan mencapai

4,022,048 pengguna dengan total **56,473,223 kunjungan**

02

Layanan ASN Karier

Digunakan untuk mencari jabatan lowong bagi ASN dan Non ASN



Rata rata harian penggunaan mencapai

6,852 pengguna dengan total **27,902 kunjungan**



2. Dukungan Digitalisasi Manajemen ASN untuk Sistem Merit

01



Layanan Kinerja

Rata rata harian penggunaan mencapai
671 pengguna dengan total **12,389 kunjungan**

02



Layanan Manajemen Talenta

Rata rata harian penggunaan mencapai
227 pengguna dengan total **5,389 kunjungan**

03



Layanan Penilaian Kompetensi / ProASN

Rata rata harian penggunaan mencapai
2 pengguna dengan total **21 kunjungan**

04



Layanan Integrated Mutasi (I-Mut)

Rata rata harian penggunaan mencapai
55 pengguna dengan total **916 kunjungan**

05



Layanan Peremajaan Data

Rata rata harian penggunaan mencapai
520 pengguna dengan total **10,206 kunjungan**



Melalui Digitalisasi Layanan Manajemen ASN, BKN berhasil mengubah pengelolaan Manajemen ASN dari proses administratif yang kompleks menjadi layanan digital yang cepat, terintegrasi, dan berbasis data, sehingga meningkatkan pengalaman ASN sekaligus memperkuat kualitas kebijakan manajemen ASN berbasis sistem merit

CAPAIAN INDEKS KUALITAS DATA ASN 2026

 Predikat	IKADA Awal		IKADA Per 4 Juni 2026	
	 Jumlah Instansi	 Persentase	 Jumlah Instansi	 Persentase
 Sangat Rendah	58	9,03%	29	4,52%
 Rendah	37	5,76%	18	2,80%
 Sedang	122	19,00%	45	7,01%
 Tinggi	425	66,20%	543	84,58%
 Sangat Tinggi	0	0,00%	7	1,09%
 TOTAL	642	100,00%	642	100,00%

Jumlah Instansi yang disajikan tanpa Instansi BNPP dan BIN.

CAPAIAN IKADA
PER 4 JUNI 2026

 **85,67%**

 **TARGET 90%**
pada akhir tahun 2026

Untuk mencapai target tersebut secara berkala dilakukan pembinaan terkait **penyelesaian disparitas data** terutama untuk Instansi yang masih dalam kategori:

-  Sangat Rendah
-  Rendah
-  Sedang



Melalui **pembinaan berkelanjutan**, diharapkan instansi yang masih dalam kategori “Sangat Rendah”, “Rendah”, dan “Sedang” dapat meningkatkan kinerja penyelesaian disparitas data secara signifikan sehingga **target 90%** dapat tercapai **pada akhir tahun 2026**.



Interoperabilitas Data / Kerjasama Pemanfaatan Data dengan Kementerian Lembaga dan Non Kementerian Lembaga

01



Kementerian Dalam Negeri

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik



Kementerian Keuangan

Data Gaji ASN K/L dan Sertifikasi Pengelola Keuangan Data Pajak



Lembaga Administrasi Negara

Data Pendidikan dan Pelatihan



Komisi Pemberantasan Korupsi

Data LHKPN



Badan Pengawas Pemilu

Data Pengawasan Netralitas pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota



Kementerian Sosial

Sinkronisasi, verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat Program bantuan sosial

02



Kementerian Sekretariat Negara

- Penetapan KP dan Pensiun untuk Jenjang JPT Utama, JPT Madya dan JF Utama
- Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bagi ASN



Kementerian Ketenagakerjaan

Verifikasi & validasi data calon penerima bantuan pemerintah bidang Ketenagakerjaan



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Data Jabatan Kategori Politically Exposed Persons (PEPs)



Badan Siber dan Sandi Negara

Layanan Penghubung Identitas Digital



Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Data Sertifikasi Kompetensi Kerja BNSP

03

Pemanfaatan Data JF



Sekretariat Jenderal DPR RI



Badan Pusat Statistik



Kementerian Kesehatan



Arsip Nasional Republik Indonesia



Badan Informasi Geospasial



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Kementerian Pekerjaan Umum



Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional



Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



Sampai dengan Mei tahun 2026, Interopabilitas data dengan mekanisme perjanjian kerja sama (PKS) telah dilakukan sebanyak **22 K/L** dan **7 Non K/L**



Tahun 2025

Data Yang Dipadankan: 729.998.480

Data yang Padan: 39.628.634



Tahun 2026

Data Yang Dipadankan: 232.937.959

Data yang Padan: 4.572.668



Interoperabilitas Sistem Informasi ASN



Interoperabilitas **SISTEM INFORMASI ASN** menggambarkan Keterhubungan Sistem Informasi Instansi Pemerintah dengan Database BKN untuk Data Riwayat Profil ASN pada platform Digital Manajemen ASN, yang diukur dengan rata-rata capaian progress keterhubungan data riwayat profil asn dari seluruh instansi.

Adapun progress keterhubungan dilihat dari pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data.

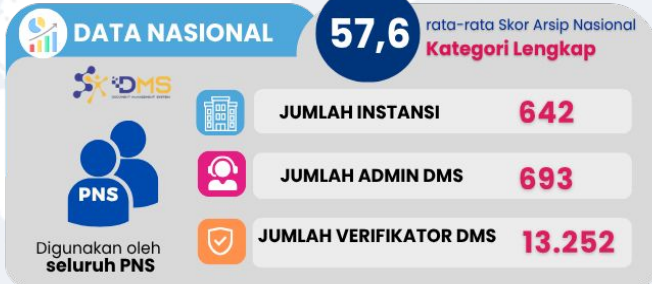
Realisasi per 1 Juni 2026 sebesar

65%



Capaian Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital

*update data per tanggal 04 Juni 2026



IN PROGRESS
PPPK

Arsip ASN PPPK saat ini telah tersedia pada DMS dan sedang tahap uji coba, nantinya seluruh arsip ASN PPPK dapat tersimpan dalam Lemari Digital (LeDi-DMS)

Progress Usulan Verifikasi myASN

11.672.025 **7.174.852** **1.478.912** **3.018.261**

Usulan

diterima

ditolak

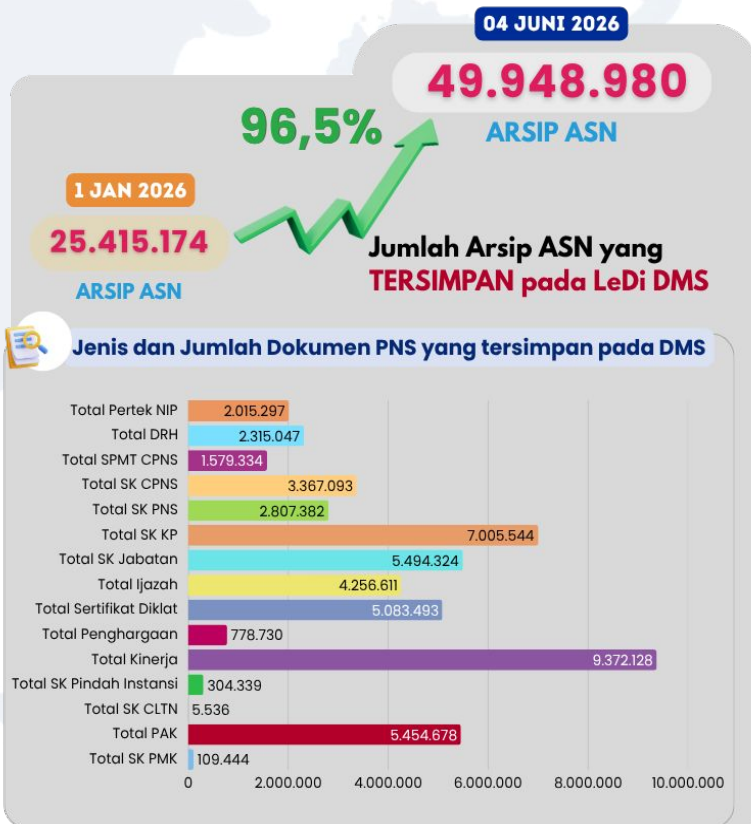
menunggu

Partisipasi ASN yang aktif upload melalui myASN

Dokumen yang sesuai dan otomatis tersimpan pada myASN

Dokumen yang tidak sesuai dan ASN dapat mengupload kembali melalui myASN

Verifikator Instansi agar segera melakukan verifikasi usulan melalui DMS



Kategori Arsip

Sangat Lengkap **12** Instansi

Lengkap **397** Instansi

"Target tahun 2026 untuk seluruh Instansi **kategori Lengkap** dengan Skor Arsip **55,6 - 90"**

Cukup Lengkap **233** Instansi

Kurang Lengkap **0** Instansi

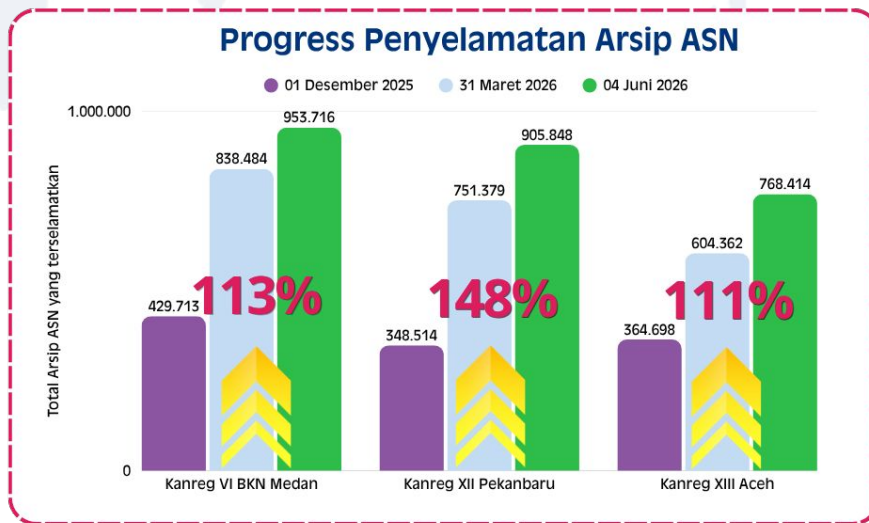
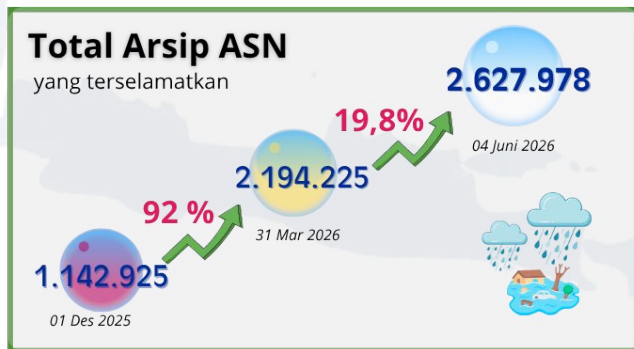
100% 2026
Berkas digital yang memenuhi standar
Baku Nasional Lemari Digital

Capaian Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital

Progress Penyelamatan Arsip ASN terdampak Bencana di Sumatera

Daerah Terdampak Bencana	Jumlah PNS	Instansi			
		Prov.	Kab.	Kota	Total
Sumatera Utara	68.871	1	7	4	12
Sumatera Barat	55.582	0	10	6	16
Aceh	59.879	1	8	2	11
TOTAL	184.332	2	25	12	39

*update data per tanggal 04 Juni 2026



"BKN terus **mengupayakan secara optimal Digitalisasi Arsip ASN melalui Lemari Digital**, sehingga **Jumlah Dokumen yang terselamatkan dalam bencana Sumatera akan terus bertambah**"



"MENJAGA ARSIP ASN TETAP AMAN
di tengah Banjir Sumatera dengan
LEMARI DIGITAL (LeDi) "

						
Jumlah PNS*	Target PNS	% Target	Realisasi 2024-2025	Realisasi 2026 s.d. Mei	Total	%
3,570,019	593,530	16.63%	441,009	10,120	451,129	12.64%

Satker	Jumlah PNS*	Target PNS	% Target	Realisasi 2024-2025	Realisasi 2026 s.d. Mei	Total	%
BKN PUSAT	973,925	93,776	9.63%	90,059	6,826	96,885	9.95%
KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA	267,210	41,297	15.45%	26,010	602	26,612	9.96%
KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA	249,983	45,431	18.17%	31,182	568	31,750	12.70%
KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG	266,628	57,824	21.69%	42,492	557	43,049	16.15%
KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR	332,923	63,973	19.22%	44,947		44,947	13.50%
KANTOR REGIONAL V BKN DKI JAKARTA	184,423	33,664	18.25%	23,589		23,589	12.79%
KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	146,476	28,077	19.17%	18,996		18,996	12.97%
KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG	204,810	36,913	18.02%	25,344	164	25,508	12.45%
KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN	186,980	72,230	38.63%	62,421	568	62,989	33.69%
KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	105,272	8,642	8.21%	1,579	3	1,582	1.50%
KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR	201,323	32,223	16.01%	20,743	346	21,089	10.48%
KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO	110,401	25,445	23.05%	19,022	290	19,312	17.49%
KANTOR REGIONAL XIII BKN PEKANBARU	181,599	33,524	18.46%	23,153	196	23,349	12.86%
KANTOR REGIONAL XIII BKN ACEH	111,970	12,442	11.11%	6,056		6,056	5.41%
KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	46,096	8,069	17.50%	5,416		5,416	11.75%
Total	3,570,019	593,530	16.63%	441,009	10,120	451,129	12.64%

Akreditasi Lembaga Penilaian Kompetensi Tahun 2026

TERAKREDITASI HINGGA

2026

70

49

KATEGORI A

21

KATEGORI B

LEMBAGA

DALAM PROSES AKREDITASI

17

11

SELESAI VISITASI

6

PERSIAPAN

LEMBAGA

Persebaran Lembaga Penilaian Kompetensi ASN Terakreditasi di Indonesia



PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELATIHAN ASN

DAFTAR PELATIHAN YANG TERSEDIA:

1 Pelatihan
Fungsional Pranata SDM Aparatur

2 Pelatihan
Fungsional Analisis SDM Aparatur

3 Pelatihan
Fungsional Asesor SDM Aparatur

4 Pelatihan
Fungsional Auditor Manajemen ASN

5 Pelatihan
Teknis Fungsional Kepegawaian

6 Pelatihan
Teknisi Manajemen ASN

7 Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

8 Pelatihan
Struktural Kepemimpinan

9 Orientasi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Metode:

- ↳ Daring
- ↳ Luring
- ↳ *Blended Learning*

PNBP

- ↳ Tarif PNBP sesuai dengan PP PNBP yang berlaku.

KALENDER PELATIHAN 2026

UNDUH DISINI



PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan Mandiri Gamifikasi dan *Microlearning*

Daftar Nama Pelatihan Mandiri :

1. AI Generative untuk ASN
2. Kenaikan Pangkat PNS
3. Microlearning Pengadaan Pegawai
4. Gamification Per BKN No 7 Tahun 2021
5. Gamification PP No 94 Tahun 2021
6. Gamification Permenpan 1 Tahun 2023
7. Gamification Permenpan 6 Tahun 2022
8. Gamification UU No 20 Tahun 2023
9. Gamification Perka BKN No 3 Tahun 2023
10. Pengembangan Kompetensi 70 : 20 : 10
11. Microlearning Tata Cara Penegakan Hukuman Disiplin
12. Microlearning Pelanggaran Disiplin
13. Microlearning Pemberhentian

Total Peserta Pelatihan Mandiri

32.085 Peserta

Periode 1 Januari 2026 – 5 Juni 2026

BKN telah mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden melalui penyelenggaraan seleksi berbasis merit yang transparan, objektif, dan akuntabel. Capaian ini memperkuat peran BKN sebagai penggerak manajemen talenta nasional dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

NO	Jenis Layanan	Jenis Seleksi	Jumlah yang Fasilitasi	Outcome
1.	Layanan Seleksi CASN	Seleksi PPPK Tingkat Instansi Kementerian HAM	23.836 peserta	Tersedianya SDM/talenta yang mempunyai kapabilitas dan sesuai kebutuhan program
2.	Layanan Seleksi Selain Pegawai ASN	Seleksi PPPK Tingkat Instansi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi	215 peserta	
		Seleksi Program Hasil Terbaik Cepat KDKMP/KNMP BP BUMN*	380.852 peserta	
		Seleksi masuk sekolah Non Ikatan Kedinasan Universitas Pertahanan	15.778 peserta	
		Seleksi selain pegawai ASN lainnya	2.915 peserta (10 Instansi)	
3.	Layanan Seleksi Pengembangan Karier PNS	Ujian Dinas/UPKP	5.800 peserta (190 Instansi)	
		Ujikom Jabatan Fungsional	131 peserta (2 Instansi)	

*berlaku tarif 0 rupiah sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis PNPB yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara



PENERIMAAN PNPB PPSR 2026

Jenis Seleksi	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan*
Seleksi Selain Pegawai ASN	Rp 2.575.700.000	Rp 1.802.300.000
Seleksi Pengembangan Karier ASN	Rp 3.240.000.000	Rp 1.081.200.000
Seleksi Sekolah Kedinasan	Rp 14.507.200.000	N/A (belum ada penetapan kebijakan pengadaan masuk sekolah kedinasan TA 2026 dari Presiden melalui Kementerian PAN RB)
Total	Rp 20.322.900.000	Rp 2.883.500.000 (14,19%)

Pagu BKN	Pagu Blokir (PNBP* dan SBSN)	Pagu Efektif BKN Saat ini
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Rp721.648.727.000	Rp11.906.235.000	Rp709.742.492.000

TOTAL REALISASI : Rp360.766.807.249



Sumber: Aplikasi My Intress Kemenkeu tanggal 8 Juni 2026



Rincian Per Program

Proyeksi s/d Juni 2026
52,00 %



Rincian Per Jenis Belanja

	Pagu	Realisasi	%
Program Dukungan Manajemen (WA)	Rp594.334.426.000	Rp274.884.261.253	46,25%
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (CO)	Rp115.408.066.000	Rp85.882.545.996	74,42%

	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp453.446.067.000	Rp229.012.519.872	50,50%
Belanja Barang	Rp220.569.292.000	Rp127.703.069.204	57,96%
Belanja Modal	Rp35.727.133.000	Rp4.051.218.173	11,34%

*) Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 perihal Tindak Lanjut atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025

Penghargaan yang diterima Badan Kepegawaian Negara pada Tahun 2026



PERINGKAT II

Kategori Pemenang Transaksi KKP Terbanyak Cluster Pagu Besar



PENGHARGAAN UTAMA

Tingkat Penyelesaian TLRHP BPK RI di atas 90% Per Semester II Tahun 2024



PERINGKAT III

Kategori Pemenang Transaksi KKP Terbanyak Cluster Pagu Besar



#BKNBapaknyaParaASN

ASN DIGITAL

Rencana Kerja Tahun 2027



@BKNgoid



@BKNgoidofficial



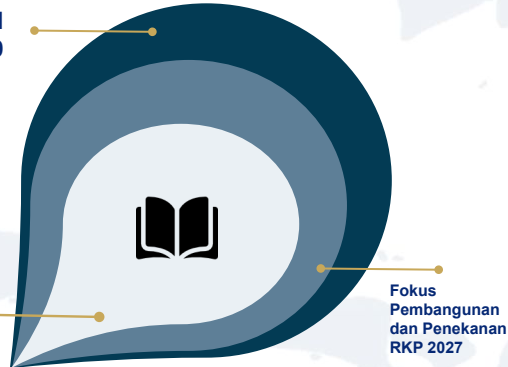
www.bkn.go.id

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"

Ilustrasi keterkaitan antara PKPN-PP-PN

RPJMN
2025-2029

PKPN



Fokus
Pembangunan
dan Penekanan
RKP 2027

Ringkasan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)

8 Klaster

KEDAULATAN PANGAN

- ❖ 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih
- ❖ 4.582 Kapal Ikan Modern
- ❖ 40.000 Lokasi Budidaya Ikan Darat Tematik
- ❖ Revitalisasi Tambak Nila Salin 14.090 Ha di Pantura
- ❖ Modeling dan Replikasi 2.000 Ha Tambak Udang Terintegrasi
- ❖ 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional
- ❖ Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi
- ❖ Pengembangan Kawasan Perkebunan (Sawit, Tebu, Kakao, Kelapa, Kopi, Jambu Mete, Rempah)
- ❖ Peningkatan Produksi Daging, Susu, dan Telur

KEMANDIRIAN ENERGI DAN AIR

- ❖ Mandatori Biodiesel 50 (B50)
- ❖ Mandatori Bioetanol 20 (E20)
- ❖ Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW
- ❖ Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)
- ❖ Konversi 6 Juta Unit Motor BBM ke Motor Listrik
- ❖ Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) untuk 1 Juta Sambungan Rumah (SR)
- ❖ Peningkatan *Lifting* Minyak dan Gas Bumi
- ❖ *10 Small Scale Green Modular Refinery and 6 Storage (Deployable Mass Model)*
- ❖ Eksplorasi 10 Blok Migas Baru
- ❖ Elektrifikasi 10.000 Desa
- ❖ Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)
- ❖ PLTA Skala Besar Terintegrasi
- ❖ Kompor Listrik untuk 2-5 Juta Rumah Tangga
- ❖ Optimalisasi 45.000 Sumur Minyak Masyarakat
- ❖ Optimalisasi *Lifting* di 13.824 Sumur Tua
- ❖ Swasembada Air

PENDIDIKAN

- ❖ Makan Bergizi Gratis Anak Sekolah
- ❖ Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah
- ❖ Bantuan Perengkakan Sekolah
- ❖ 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT)
- ❖ Studio Guru
- ❖ Digitalisasi Pendidikan (2 Juta Papan Interaktif Digital)
- ❖ 20 Sekolah Garuda Baru, 80 Sekolah Garuda Transformasi
- ❖ 514 Sekolah Rakyat
- ❖ 10 Universitas Baru: *Medical University* berbasis STEMM
- ❖ 500.000 Lulusan SMK Go Global
- ❖ Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional
- ❖ Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan
- ❖ Peleindungan Anak di Ruang Digital melalui PP TUNAS

KESEHATAN

- ❖ Makan Bergizi Gratis Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
- ❖ 66 Rumah Sakit *Upgrade*
- ❖ Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- ❖ Penuntasan Tuberkulosis

HILIRISASI DAN INDUSTRIALISASI

- ❖ Hilirisasi Industri Strategis (18 Proyek)
- ❖ Mobil Nasional
- ❖ Motor Nasional
- ❖ Ekosistem Industri Kedirgantaraan
- ❖ Pengembangan Industri Semikonduktor

INFRASTRUKTUR, PERUMAHAN, DAN KETAHANAN BENCANA

- ❖ *Giant Sea Wall*
- ❖ Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera
- ❖ Gerakan ASRI (Gentengisiasi, Pengendalian Sampah, Penghijauan)
- ❖ 3 Juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru & 2 Juta Renovasi Rumah
- ❖ Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional

EKONOMI KERAKYATAN DAN DESA

- ❖ 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- ❖ Percepatan Pembangunan Daerah 3T

PENURUNAN KEMISKINAN

- ❖ PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi
- ❖ PRO-KESRA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja

DIDUKUNG OLEH: HANKAM, PENEGAKAN HUKUM, TATA KELOLA, DIGITALISASI, DAN DIPLOMASI EKONOMI

Pusat Data Nasional

Pemberantasan Judi Online

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Pemberantasan Penyelundupan

Program Kerja Prioritas Nasional BKN Tahun 2027 sesuai RPJMN 2025–2029

Misi Asta Cita Ke-7:

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan

Arah Kebijakan

Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

Program Prioritas 07

Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN

KP 4 Digitalisasi Manajemen ASN

Penguatan Data Profile ASN
Target: 1 Data

Program Prioritas 10

Pemerintahan Digital

KP 3 Penerapan Pengembangan Kompetensi ASN yang Mendorong Kemudahan Akses Belajar

Pemetaan Potensi dan Kompetensi PNS
Target: 1.500.000 pegawai

SUMBER: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029



PROGRAM KERJA PRIORITAS – Mendukung PKPN

1

Layanan Integrasi Data dan Layanan Manajemen ASN pada Ekosistem Pemerintahan Digital Nasional

Integrasi data ASN, layanan kepegawaian digital, dan interoperabilitas data dengan K/L/D pelaksana PKPN untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

2

Pengadaan dan Pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur pada Program Kerja Prioritas Nasional

Facilitasi perencanaan kebutuhan/formasi ASN, pengadaan ASN, penetapan NIP, serta pemenuhan SDM aparatur pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pangan, desa, dan kemiskinan.

3

Penataan Jabatan Fungsional untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional

Penataan, pemetaan, dan penguatan jabatan fungsional strategis yang mendukung PKPN, antara lain guru, tenaga kesehatan, penyuluh, analis kebijakan, auditor, pengawas, dan tenaga teknis digital.

4

Penyusunan Model pengelolaan kinerja dan sistem penghargaan ASN berbasis digital untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pada sektor Prioritas Nasional

Penyusunan model kinerja ASN berbasis digital dan sistem penghargaan yang terhubung dengan capaian program prioritas nasional untuk meningkatkan produktivitas, akuntabilitas, dan kesejahteraan ASN.

5

Pengawasan dan Pengendalian Kepatuhan Manajemen ASN pada K/L/D Pelaksana Program Kerja Prioritas Nasional

Pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan manajemen ASN pada K/L/D pelaksana PKPN, termasuk mutasi, promosi, kinerja, disiplin, dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

6

Penguatan Tata Kelola, Perencanaan, Penganggaran, dan Dukungan Manajemen BKN dalam Mendukung Program Kerja Prioritas Nasional

Penguatan koordinasi perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, manajemen risiko, dukungan regulasi, bahan pimpinan, dan dukungan operasional BKN dalam pelaksanaan agenda PKPN.



PROGRAM KERJA PRIORITAS – Mendukung Prioritas Nasional Sesuai RKP

7



Pemetaan Kompetensi dan Potensi PNS

Penilaian kompetensi dan potensi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan untuk memetakan kompetensi dan potensi pegawai ASN sesuai dengan standar kompetensi dan standar potensi. Dilakukan dengan dua metode, yaitu metode *Assessment Center* dan metode lainnya berupa *Computer Assisted Competency Test (CACT)* dengan target volume 1.500.000 orang

8



Penguatan Database Profil ASN

Peningkatan kualitas, integrasi, konsistensi, dan keterpaduan data ASN yang mendukung interoperabilitas layanan digital ASN, peningkatan Indeks Kualitas Data ASN (IKADA), serta penyediaan data ASN yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen ASN berbasis data dan implementasi sistem merit secara nasional



PELAKSANAAN PEMBINAAN MANAJEMEN ASN TERINTEGRASI TAHUN 2026 - 2027

Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi minimal berkategori baik mencapai 100 persen atau 643 Instansi Pemerintah.

RENCANA KEGIATAN	8 KLASER PROGRAM KERJA PRIORITAS NASIONAL (PKPN)							
	KEDAULATAN PANGAN	KEMANDIRIAN ENERGI DAN AIR	PENDIDIKAN	KESEHATAN	HILIRISASI DAN INDUSTRIALISASI	INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KETAHANAN BENCANA	EKONOMI KERAKYATAN DAN DESA	PENURUNAN KEMISKINAN
PENYUSUNAN REKOMENDASI PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL UNTUK Mendukung PROGRAM KERJA PRIORITAS NASIONAL			O	O				
PEMBINAAN BIDANG BUDAYA KERJA DAN CITRA INSTITUSI ASN	O	O	O	O	O	O	O	O
PENGUATAN KINERJA INDIVIDU BERDAMPAK PADA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	O	O	O	O	O	O	O	O
PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN REDESAIN KESEJAHTERAAN ASN DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR (3T)							O	
PENYUSUNAN MODEL PENGELOLAAN KINERJA DAN SISTEM PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS DIGITAL UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KESEJAHTERAAN PADA SEKTOR PRIORITAS NASIONAL	O	O	O	O	O	O	O	O



1

**PENYUSUNAN
REKOMENDASI PENATAAN
JABATAN FUNGSIONAL
UNTUK Mendukung
PROGRAM KERJA
PRIORITAS NASIONAL**

Output : Rekomendasi Penataan Jabatan Fungsional untuk Mendukung Program Kerja Prioritas Nasional



3

**PENGUATAN KINERJA
INDIVIDU BERDAMPAK PADA
PROGRAM PRIORITAS
NASIONAL**

Output:

1. Rekomendasi Kebijakan Model Pengelolaan Kinerja berdampak pada instansi yang memiliki Program Prioritas Nasional
2. Instansi pilot yang telah memiliki pengelolaan kinerja berdampak
3. Digitalisasi Pengelolaan Kinerja Pada Instansi dengan Program Prioritas Nasional



2

**PEMBINAAN BIDANG
BUDAYA KERJA DAN
CITRA INSTITUSI ASN**

Output : Pedoman Penyusunan Panduan Perilaku ASN berdasarkan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode



4

**PENYUSUNAN REKOMENDASI
KEBIJAKAN REDESAIN
KESEJAHTERAAN ASN DI
DAERAH TERTINGGAL,
TERDEPAN, DAN TERLUAR (3T)**

Output:

1. Rekomendasi Kebijakan Redesain Kesejahteraan ASN di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)



5

**PENYUSUNAN MODEL PENGELOLAAN
KINERJA DAN SISTEM PENGHARGAAN
APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS
DIGITAL UNTUK PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS DAN
KESEJAHTERAAN PADA SEKTOR
PRIORITAS NASIONAL**

Output:

1. Kerangka Model Penghargaan Berbasis Kinerja dan Kompetensi
2. Panduan Teknis Implementasi Sistem Pengelolaan Kinerja Digital
3. Modul Bimbingan Teknis dan Bahan Sosialisasi Komprehensif
4. Rekomendasi Kebijakan Teknis Sistem Penghargaan berbasis Kinerja



Kedaulatan Pangan

Peraturan Presiden nomor
83 Tahun 2024 tentang
Badan Gizi Nasional



- Penyelesaian penetapan NIP untuk pengisian ASN BGN.



Pendidikan

Inpres RI Nomor 7 Tahun
2025
Inpres RI Nomor 8 Tahun
2025



- Penyelesaian pengisian ASN untuk sekolah rakyat dengan mekanisme pindah instansi dan rekrutmen;
- Penyelesaian pengisian ASN untuk sekolah unggul garuda;
- Verifikasi dan validasi formasi untuk pemenuhan kebutuhan ASN untuk sekolah nasional terintegrasi;
- Pemenuhan pengisian ASN untuk sekolah nasional terintegrasi.



Kesehatan

Inpres RI Nomor 5 Tahun
2025



- Pemenuhan pengisian tenaga kesehatan untuk Rumah Sakit PHTC di daerah terpencil.

Rencana Pengembangan Layanan Kepegawaian Tahun 2027



Program Kerja Kedeputan Sistem Digitalisasi Manajemen ASN dalam Mendukung PKPN Tahun 2027



Dukungan Seleksi & Kinerja ASN

Mendukung pelaksanaan seleksi CASN lebih dari **7,7 juta peserta seleksi** secara transparan dan akuntabel, serta manajemen kinerja dengan pengguna **4,4 juta ASN** berbasis data untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

OUTPUT



- Terwujudnya 1 sistem seleksi CASN
- Terwujudnya 1 sistem kinerja ASN



Perlindungan dan Pemanfaatan arsip ASN:

1. Penanganan Arsip ASN pasca Bencana Sumatera
2. Percepatan Digitalisasi Arsip ASN
3. Percepatan Pengembangan Layanan Arsip :
 - Arsip ASN PPPK
 - Penyusutan Arsip ASN
 - Pemindahan Arsip ASN Statis

OUTPUT



- Meningkatnya jumlah arsip ASN yang terdigitalisasi dan terkelola dalam Lemari Digital (DMS)
- Terwujudnya pengelolaan arsip ASN yang tertib, aman, dan mudah diakses
- Meningkatnya efisiensi layanan administrasi kepegawaian berbasis dokumen digital
- Terjaganya keamanan dan keberlanjutan arsip ASN



1 Pengembangan dan Pemeliharaan Platform ASN Digital

OUTPUT

Sebanyak 47 layanan ASN Digital terintegrasi dalam satu platform dengan 6,7 juta ASN pengguna aktif, memastikan ketersediaan layanan digital di seluruh instansi pemerintah.



Tersedianya 47 layanan digital ASN yang mudah diakses oleh seluruh ASN melalui 1 Platform ASN Digital



2 Integrasi dan Interoperabilitas Data ASN

OUTPUT

Integrasi dan peningkatan kualitas data ASN nasional dilakukan melalui penguatan tata kelola, interoperabilitas, dan pemanfaatan data analitik untuk mendukung kebijakan manajemen ASN dan PKPN yang tepat sasaran berbasis data.



Tersedianya dashboard dan data analitik ASN untuk mendukung kebijakan berbasis data



3 Penguatan Data Profile ASN (PN 2027)

OUTPUT

Penguatan Database Profil ASN dilaksanakan melalui pengayaan, pemutakhiran, integrasi, dan peningkatan kualitas data profil ASN yang mencakup riwayat jabatan, kompetensi, kinerja, pendidikan, penghargaan, dan informasi kepegawaian lainnya guna menyediakan profil ASN yang komprehensif, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan kebutuhan ASN, manajemen talenta, pengembangan karier, serta implementasi sistem merit dalam mendukung pengambilan kebijakan manajemen ASN yang objektif, transparan, dan berbasis data. (Program berdasarkan Perpres 12 Tahun 2025)



- Meningkatnya layanan manajemen ASN yang berbasis digital melalui layanan profil ASN yang komprehensif dan terintegrasi



4 Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Data Recovery Center (DRC) BKN

OUTPUT

Dalam menjamin keberlangsungan layanan pada Platform ASN Digital yang sudah diakses oleh lebih dari 6,7 juta ASN serta **7,7 juta peserta seleksi**, Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Data Recovery Center (DRC) BKN dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pusat data, jaringan, sistem keamanan informasi, serta pengembangan fasilitas pemulihan bencana (DRC) di Balikpapan.

- Meningkatnya kapasitas, keandalan, dan keamanan pusat data BKN
- Tersedianya infrastruktur DRC yang mendukung pemulihan layanan secara cepat saat terjadi gangguan atau bencana
- Terjaminnya keberlangsungan layanan Platform ASN Digital dan layanan seleksi CASN nasional
- Meningkatnya efisiensi infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung layanan digital ASN nasional

Tugas Utama Deputi Wasdal MASN (Pasal 22 Perpres 92 Tahun 2024)

1.  **Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan teknis Manajemen ASN**
Memastikan kebijakan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Manajemen ASN dilaksanakan secara efektif dan konsisten
2.  **Pengawasan penerapan Sistem Merit**
Melakukan pengawasan Memastikan kebijakan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Manajemen ASN dilaksanakan secara efektif dan konsisten
3.  **Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi ASN**
Mengawasi pelaksanaan disiplin ASN, pengembangan kompetensi, dan tata kelola Manajemen ASN yang berintegritas dan akuntabel. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil wasdal
4.  **Pengawasan disiplin, kompetensi, dan tata kelola ASN**
Mengawasi pelaksanaan disiplin ASN, pengembangan kompetensi, dan tata kelola Manajemen ASN yang berintegritas dan akuntabel
5.  **Pembinaan dan supervisi pengawasan Manajemen ASN**
Memberikan pembinaan teknis serta supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Manajemen ASN di Instansi Pemerintah

Peran Strategis Dalam Tata Kelola ASN

-  **Pengawasan Sistem Merit**
Memastikan ASN direkrut, ditempatkan, dan dikembangkan secara adil, kompeten, dan bebas intervensi
-  **Pengendalian Kinerja ASN**
Memastikan kinerja ASN terukur, selaras dengan target organisasi dan berdampak pada hasil pembangunan
-  **Monitoring Disiplin & Etika**
Menjamin ASN bekerja dengan integritas, mematuhi aturan, dan memberikan pelayanan publik berkualitas
-  **Pengawasan Penempatan ASN**
Memastikan penempatan ASN sesuai formasi, tepat jabatan, tepat kompetensi, dan pada sektor prioritas nasional
-  **Evaluasi Kebijakan ASN**
Menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan untuk tata kelola ASN yang adaptif dan berkelanjutan
-  **Pengawasan Implementasi NSPK**
Menjamin keseragaman penerapan standar dan prosedur Manajemen ASN secara nasional

Keterkaitan dengan 8 Program Kerja Prioritas Nasional 2027



1. Kedaulatan Pangan
2. Kemandirian Energi dan Air
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Hilirisasi dan Industrialisasi
6. Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana
7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa
8. Penurunan Kemiskinan



- Memastikan ASN di program kerja prioritas nasional untuk bekerja secara efektif, profesional dan berintegritas
- Menjamin tata kelola berbasis merit
- Mengendalikan kualitas dan pemerataan ASN untuk meningkatkan layanan bermutu bagi seluruh masyarakat
- Penguatan kapasitas ASN daerah dalam mendukung program kerja prioritas nasional



Kegiatan



Substansi Pengawasan dan Pengendalian



Target Output

1



Pengawasan dan Pengendalian terhadap Manajemen Talenta



Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pemetaan Talenta, Akuisisi Talenta, Pengadaan ASN, Pengembangan Talenta, Retensi Talenta, Pemantauan dan Evaluasi

2



Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengelolaan Kinerja



Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

3



Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengembangan Kompetensi



Pengawasan dan Pengendalian terhadap Standar Kompetensi Jabatan, Pengukuran Kompetensi, Program Pengembangan Kompetensi

4



Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penguatan Budaya Kerja dan Citra institusi



Pengawasan dan Pengendalian terhadap Internalisasi Nilai Dasar ASN, Keteladanan dan Kepemimpinan, dan Dukungan Kebijakan

5



Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penghargaan dan Pengakuan



Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kenaikan Pangkat, Gaji dan Tunjangan, dan Jaminan Sosial

6



Pengawasan dan Pengendalian terhadap Disiplin, Pemberhentian dan Upaya Administratif



Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pembinaan dan Penegakan Disiplin, Pemberhentian, dan Upaya Administratif

7



Pengawasan dan Pengendalian terhadap Digitalisasi Manajemen ASN



Pengawasan dan Pengendalian terhadap Data Manajemen ASN dan Layanan Digital Manajemen ASN



**Rekomendasi
Hasil
Pengawasan
dan
Pengendalian**

Rencana Kerja Pengawasan Dan Pengendalian Manajemen Asn Tahun 2027

 Kegiatan	 Substansi Pengawasan dan Pengendalian	 Target Output
Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengangkatan/ Pemindahan/ Promosi/ Mutasi/ Pengukuhan	1. Pengawasan dan pengendalian terhadap kenaikan pangkat, kenaikan jenjang ASN yang dipindahkan ke Program Kerja Prioritas Nasional; 2. pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengangkatan/pemindahan/promosi/mutasi terhadap ASN yang berada di instansi terkait agar sesuai dengan kebutuhan dalam ketercapaian target delapan program kerja prioritas nasional melalui apiikasi I-Mut	639 Instansi
Pengawasan dan Pengendalian terhadap penegakan disiplin ASN	Pengawasan dan Pengendalian terhadap proses penegakan disiplin ASN melalui apiikasi I-Dis	639 Instansi

Rencana Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Tahun 2027

Kegiatan	Output
Fasilitasi Penilaian Kompetensi dan Potensi ASN a. Penilaian Kompetensi dengan Metode Assessment Center b. Penilaian Kompetensi dengan Metode Lainnya c. Integrasi/rekon data Penilaian Kompetensi	134.317 ASN
Akreditasi Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN	15 Lembaga (Akreditasi lembaga baru pada tiap provinsi yang belum terdapat lembaga penilaian kompetensi)

Rencana Kerja Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Tahun 2027

Kegiatan	Output	Outcome
Layanan Seleksi Pengembangan Karier	26.055 Peserta	- Peningkatan kompetensi PNS - Peningkatan karier PNS - Peningkatan kesejahteraan PNS - Peningkatan kinerja individu dan organisasi
Layanan Seleksi Selain Pegawai ASN	25.757 Peserta	- Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan seleksi - SDM yang profesional dan berintegritas - Peningkatan kepercayaan publik - Implementasi sistem merit - Penguatan citra organisasi
Layanan Seleksi Sekolah Kedinasan	120.000 Peserta	- Mahasiswa/Praja/Taruna yang kompeten dan berkualitas - Peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik - Peningkatan kinerja instansi
Seleksi CASN (Menunggu lebih lanjut kebijakan pengadaan CASN pada tahun 2027 dari Presiden melalui Kementerian PAN RB)		- ASN yang profesional dan berintegritas - Peningkatan kepercayaan publik - Implementasi sistem merit - Peningkatan kinerja instansi

Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian 2027- 2029 (Lulus)



LATAR BELAKANG

- ✓ Selaras dengan Asta Cita Presiden Nomor 4 dan Nomor 7.
- ✓ BKN menyelenggarakan Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) jenjang S1 sejak 2007 untuk PNS dari seluruh instansi pusat dan daerah.
- ✓ Sejak 2024, PIK BKN juga dikembangkan pada jenjang S2 bagi PNS internal BKN melalui kerja sama dengan 3 PT Akreditasi Prodi A (UNJ, UNS dan Telkom).
- ✓ Pada tahun 2027 terdapat **68 orang** peserta didik (S1 dan S2) yang masih dalam proses pendidikan dan memerlukan pembiayaan.



Kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Kepegawaian



Output

Meningkatnya kualifikasi pendidikan PNS jenjang S1 dan S2 sebanyak

68 orang.



Biaya

**Rp 1.743.253.000
2027-2029 (Lulus)**



Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian jenjang S1 dan S2 untuk ASN yang masih dalam proses pendidikan pada periode 2027-2029.

Rencana Pembangunan Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) BKN yang Dibiayai SBSN TA 2027



“Pembangunan UPT ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal kepada publik melalui penyelenggaraan seleksi CASN dan non-CASN serta pelayanan asesmen pegawai di bidang manajemen ASN”

**) Melalui Surat Kepala BKN No. 3115/B-PR.05.01/SD/A/2026, BKN mengusulkan perubahan alokasi anggaran pembangunan UPT BKN Aceh dan UPT BKN Ambon dari semula Rp82.975.178.000,00 menjadi Rp 81.484.433.000,00*



#BKNBapaknyaParaASN

ASN DIGITAL

PAGU INDIKATIF BKN TAHUN 2027 DAN USULAN KEBUTUHAN ANGGARAN BKN TAHUN 2027



@BKNgoid



@BKNgoidofficial



www.bkn.go.id

Sesuai Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05.2026 dan Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.03/2026 tanggal 7 Mei 2026.

Dalam Ribuan

 PROGRAM	 RUPIAH MURNI	 PNPB	 SBSN	 TOTAL SESUAI SBPI
 Program Dukungan Manajemen (WA)	Rp522.528.667*	-	Rp82.975.178	Rp605.503.845
 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola (CO)	-	Rp23.432.597	-	Rp23.432.597
 TOTAL ALOKASI ANGGARAN**	Rp522.528.667	Rp23.432.597	Rp82.975.178	Rp628.936.442

*)Terdiri atas:

1. Belanja Operasional Pegawai (Komponen 001) 410.980.130
2. Belanja Operasional Barang (Komponen 002) 111.548.537

PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN BKN 2026-2027

Dalam Ribuan Rupiah

NO	 Satuan /Unit Kerja	 PAGU 2026	 PAGU 2026 SETELAH S-181	 PAGU INDIKATIF 2027	% *
	 Total	639.467.823	619.473.105	628.936.442	 1,53%
1	 OPS	578.612.011	558.617.293	522.528.667	 6,46%
	• Belanja Pegawai	454.622.044	453.446.067	410.980.130	 9,37%
	• Belanja Barang	123.898.967	105.171.226	111.548.537	 6,06%
2	 Non OPS	60.855.812	60.855.812	106.407.775	 74,85%
	• Rupiah Murni	0	0	0	-
	• PNBP	24.213.063	24.213.063	23.432.597	 3,22%
	• SBSN	36.642.749	36.642.749	82.975.178	 126,44%

*)perbandingan antara **pagu Indikatif 2027 dengan pagu 2026 setelah s-181**

KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN BKN TAHUN 2027

ASN DIGITAL

KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PKPN DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI RKP TA 2027

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	Layanan Integrasi Data dan Layanan Manajemen ASN pada Ekosistem Pemerintahan Digital Nasional	Rp	Rp147.365.000.000
2	Pengadaan dan Pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur pada Program Kerja Prioritas Nasional	Rp	Rp10.000.000.000
3	Penataan Jabatan Fungsional untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional	Rp	Rp2.000.000.000
4	Penyusunan Model pengelolaan kinerja dan sistem penghargaan ASN berbasis digital untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pada sektor Prioritas Nasional	Rp	Rp3.000.000.000
5	Pengawasan dan Pengendalian Kepatuhan Manajemen ASN pada K/L/D Pelaksana Program Kerja Prioritas Nasional	Rp	Rp18.800.000.000
6	Penguatan Tata Kelola, Perencanaan, Penganggaran, dan Dukungan Manajemen BKN dalam Mendukung Program Kerja Prioritas Nasional	Rp	Rp25.000.000.000
7	Pemetaan Kompetensi dan Potensi PNS	Rp	Rp20.819.300.000
8	Penguatan Database Profil ASN	Rp	Rp3.000.000.000
TOTAL		Rp	Rp229.984.300.000

KEBUTUHAN BELANJA OPERASIONAL BKN TA 2027

NO	JENIS BELANJA	KEBUTUHAN ANGGARAN	ANGGARAN SESUAI SBPI	KETERANGAN	USULAN TAMBAHAN ANGGARAN
1	Belanja Pegawai	Rp Rp436.528.849.000	Rp Rp410.980.130.000	Anggaran sesuai SBPI hanya dapat memenuhi untuk gaji bulanan dan THR, sedangkan untuk gaji ke-13 tidak bisa dipenuhi	Rp Rp25.548.719.000
2	Belanja Barang (Operasional)	Rp Rp154.630.952.000	Rp Rp111.548.537.000	Anggaran tersebut dibutuhkan untuk kebutuhan pemeliharaan gedung bangunan dan lisensi digital.	Rp Rp43.082.415.000
TOTAL					Rp Rp68.631.134.000

Telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas melalui **trilateral meeting tanggal 22 Mei 2026.**



USULAN TAMBAHAN ANGGARAN BKN TA 2027

 NO	 URAIAN	 KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN
1 	Program Dukungan Manajemen (WA)	Rp Rp235.496.134.000
	Operasional Belanja Pegawai (001)	Rp Rp25.548.719.000
	Operasional Non Belanja Pegawai (002)	Rp Rp43.082.415.000
	Non Operasional (Indikasi program dukungan PKPN)	Rp Rp166.865.000.000
2 	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola (CO) (Indikasi program dukungan PKPN)	Rp Rp63.119.300.000
 TOTAL		Rp Rp298.615.434.000



#BKNBapaknyaParaASN

ASN DIGITAL

Terima Kasih

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



@BKNgoid



@BKNgoidofficial



www.bkn.go.id